

Pemkot Cirebon Kampanyekan Gemarikan untuk Cegah Stunting

CIREBON (IM) - Pemerintah Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan guna mencegah stunting pada anak. “Kami terus mengkampanyekan Gemarikan kepada semua lapisan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati di Cirebon, Rabu (14/6).

Dia menyampaikan perlunya penyuluhan mengenai pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Selain merupakan sumber protein hewani, ikan mengandung Omega-3, yodium, selenium, flourida, zat besi, magnesium, zink, dan taurin. Di samping kaya nutrisi, ikan harganya cukup terjangkau.

“Jadi baik dikonsumsi oleh masyarakat, terutama yang memiliki balita dan anak-anak,” kata Eti.

Dia menyampaikan bahwa upaya pencegahan

dan penanggulangan stunting melibatkan instansi lintas sektoral. “Kami sudah meminta semua dinas bergerak untuk menekan angka tengkes, karena ini merupakan kerja kolektif,” katanya.

Angka kasus stunting pada anak di Kota Cirebon yang pada 2022 mencapai 30,6 persen sudah turun menjadi 17 persen pada Mei 2023. “Saat ini sudah turun di angka 17 persen, diharapkan akhir tahun bisa kembali turun,” kata Eti.

Pemerintah menjalankan berbagai program intervensi untuk menurunkan angka kasus stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Program intervensi yang dijalankan mencakup bantuan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, peningkatan pelayanan konsultasi gizi dan kesehatan, pendampingan keluarga, hingga peningkatan akses terhadap fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi layak. ● **pra**

32 Sapi di Kota Bogor Terjangkit Virus LSD, Pemkot Gelar Vaksinasi

BOGOR (IM) - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bogor mencatat ada 32 kasus Lumpy Skin Disease (LSD) telah ditemukan pada sapi perah. Penyakit hewan yang disebabkan oleh virus itu menyebar di 3 kecamatan di Kota Bogor.

“Untuk Kota Bogor kita sudah ada 32 kasus yang terkonfirmasi positif LSD, tapi sebagai besar 50 persennya itu sudah mengalami kesembuhan,” kata Kabid Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Anijar, Rabu (14/6).

“Itu ada tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Timur, dan Bogor Selatan, berdasarkan laporan masyarakat melihat gejala-gejala pada hewan,” tambahnya.

Anijar mengatakan kasus LSD pertama di Kota Bogor ditemukan sekitar bulan lalu. Ia menduga penyebaran LSD di Kota Bogor berasal dari sapi yang dibeli masyarakat di Kota Depok.

“Kalau Kota Bogor sendiri menurut kita karena lalu lintas ya penyebarannya. Jadi ada dugaan kasus pertama itu adanya dari Depok, bawakan dari Depok lalu ke Kota Bogor, ada sapi dari sana yang dibeli masyarakat kemudian dijual

kembali di Bogor,” kata Anijar.

LSD, menurut Anijar, menyebar melalui lalat atau nyamuk yang menggigit sapi terjangkit LSD.

Penyakit itu menyebabkan demam dan muncul benjolan pada kulit hewan terjangkit.

“Kalau dampaknya dibandingkan sama PMK mungkin agak beda ya. Kalau ini kan angka kematian hanya 10 persen, persakitannya 40 persen, tapi kan ini menyebabkan penurunan ekonomi pada masyarakat karena orang melihatnya gimana kan. Jadi harga sapi jadi menurun,” kata Anijar.

“Sejauh ini LSD hanya menyebar pada sapi dan kerbau, kalau kambing tidak. Sapi atau kerbau yang terjangkit LSD ini masih aman di konsumsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anijar mengatakan, vaksinasi terus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus LSD di Kota Bogor, terutama pada sapi dan kerbau yang akan dijual jelang hari raya kurban.

“Hari ini vaksinasi kedua, sebelum kita lakukan 10 hari lalu, kita vaksinasi di beberapa tempat penampungan hewan. Stok vaksin kita ada 500 dosis, baru kita pakai 150 dosis 10 hari lalu, pada proses vaksinasi pertama,” kata Anijar. ● **yan**

Polres Bogor Upayakan Pemulangan Puluhan Pekerja Migran Ilegal dari Malaysia

BOGOR (IM) - Polres Bogor berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berupaya untuk memulangkan puluhan pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal. Puluhan pekerja migran itu sebelumnya ditampung di penampungan pekerja migran ilegal di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi 61 korban. Sebanyak 22 di antaranya tidak jadi berangkat ke luar negeri, sedangkan 39 sisanya diduga keras masih berada di luar negeri yakni Malaysia.

“Kami sedang koordinasi dengan BP2MI untuk dikoordinasikan di negara tempat tujuan untuk dipulangkan,” kata Iman kepada awak media, Rabu (14/6).

Sementara itu, Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor, AKP Yohanes Redhoi Sigi, mengatakan, modus empat tersangka yang ditangkap Polres Bogor dalam merekrut para pekerja migran ilegal itu, ialah mengiming-imingi sejumlah uang. Para korban dijanjikan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran yang legal.

“Pada kenyataannya setelah berhasil direkrut, ternyata para korban diajak membuat paspor dan visa yang tidak sesuai ketentuan,

yaitu (visa) untuk wisata, padahal harusnya (visa) untuk bekerja,” kata Yohanes.

Ia menjelaskan, perekrutan yang dilakukan para tersangka dilakukan melalui media sosial. Yakni dengan mengunggah informasi adanya lowongan pekerjaan di luar negeri dalam kurun waktu tertentu, dan jumlah gaji yang tertera.

Yohanes menyebutkan, tersangka menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai petugas kebersihan dan asisten rumah tangga (ART). Jumlah gaji yang dijanjikan ialah sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

“Tersangka mencantumkan nomor teleponnya, setelah dihubungi, melaksanakan modus seperti yang disampaikan tadi,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan Polres Bogor mengungkap dan menangkap empat perekrut pekerja migran ilegal, yang beraksi di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Salah seorang pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial LS (49 tahun) merupakan residivis atas kasus yang sama.

Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penampungan pekerja migran ilegal. Setelah dilakukan upaya penyelidikan, polisi menemukan dugaan adanya unsur TPPO. ● **gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PERCEPATAN PENETAPAN HUTAN ADAT

Area hutan adat Kasepuhan Pasir Eurih di Sobang, Lebak, Banten, Rabu (14/6). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mempercepat penetapan hutan adat di 40 lokasi hutan di Indonesia, sesuai dengan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) guna menekan deforestasi sekaligus mendukung konservasi hutan adat.

Jawa Barat Tawarkan Peluang Investasi ke Investor Jepang dan Korea Selatan

Kami telah menggelar acara Road to West Java Investment Summit 2023, di mana kegiatan ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, yang dihadiri oleh 100 investor dari Korea Selatan dan Jepang, yang digelar di Jakarta, kata Kepala Dinas DPMPPTSP Jawa Barat, Nining Yulistiani.

BANDUNG (IM) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Jawa Barat (jabar) menawarkan peluang

investasi kepada 100 investor dari Jepang dan Korea Selatan, dalam acara Investment Roadshow yang merupakan rangkaian acara dari Road to

West Java Investment Summit Tahun 2023.

“Kami telah menggelar acara Road to West Java Investment Summit 2023, di mana kegiatan ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, yang dihadiri oleh 100 investor dari Korea Selatan dan Jepang, yang digelar di Jakarta,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Jawa Barat, Nining Yulistiani, ketika dihubungi, Rabu (14/6).

Dia mengatakan, berbeda dengan West Java Investment Summit (WJIS) tahun 2023,

acara puncak WJIS tahun ini akan dilaksanakan pada Agustus 2023, dan para investor diundang hadir lebih dulu dalam “roadshow” agar memahami dan mengenal proyek investasi yang akan ditawarkan di WJIS.

“Nanti para investor ini hadir di WJIS tidak lagi melihat-lihat dan mencari informasi proyek strategis yang kita tawarkan sehingga nanti kemungkinan datang di WJIS tinggal deal-nya,” ujar Nining.

Dia mengatakan pada kegiatan tersebut ada juga *networking session* dan *one-on-one meeting* terhadap investor terkait beberapa proyek yang telah dikurasi mengikuti minat dari investor Jepang dan Korsel.

“Saat ini, kita sarannya untuk investor dari Jepang dan Korea Selatan. Dua negara ini termasuk lima besar negara yang berinvestasi di Jawa Barat,” katanya.

Menurut Nining, cara ini merupakan strategi promosi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Bank Indonesia Jabar untuk memperkuat pesan bahwa Jawa Barat siap mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Ia mengatakan hal ini juga sesuai dengan arahan Guber-

nur Jawa Barat, M Ridwan Kamil kepada DPMPPTSP Jawa Barat, untuk melakukan door to door investment promotion sebagai pendekatan yang berbeda dalam menarik para investor.

“Membangun komunikasi yang lebih dekat, menawarkan beragam potensi investasi hingga peluang-peluang proyek yang *sustainable* sehingga daya tarik setiap proyek yang ada di Jabar dapat dilirik bahkan diminati para investor,” katanya.

Sejumlah pemilik proyek di antaranya PT BIJB, Himpunan Kawasan Industri (HKI), Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, PT RNI, Dinas Perhubungan Jabar serta Badan Pengelola Kawasan Rebana turut hadir mempromosikan peluang investasi di kawasan tersebut.

Adapun proyek yang ditawarkan pada Investment Roadshow di antaranya adalah Subang Sugar Factory, Metropolitan Bandung Railway (LRT), Jatigede *Regional Water Supply System*, Kertajati Airport, kawasan industri yang ada di Jabar dan Metropolitan Rebana.

Pihaknya optimis langkah mendukung pertumbuhan investasi tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. ● **pra**

Dinkes Kabupaten Cirebon Tutup Mulut Masalah Proyek Antropometri

CIREBON (IM) - Sampai saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon masih belum memberikan klarifikasi terkait proyek pengadaan antropometri senilai Rp22 miliar.

Salah satu pegiat sosial Kabupaten Cirebon menyangkan sikap Dinkes tersebut. Seharusnya, pemberitaan di beberapa media yang masih mempertanyakan mekanisme lelang itu, segera ditanggapi.

“Kami sangat menyangkan sikap Kadinkes, Sekdis dan PPK yang tidak segera melakukan klarifikasi. Pemberitaan terkesan liar karena memang tiga pejabat itu enggan memberikan keterangan,” kata Sekretaris Repdem Kabupaten Cirebon, Warsono Semaun, Rabu (14/6).

Warcono menjelaskan, pihaknya ingin mempertanyakan, siapa pemenang lelang tersebut. Pasalnya, ada kejanggalan ketika ada kabar, pengumuman pemenang di tanggal 23 Mei. Harusnya, ketika sudah ada pemenang lelang, tidak boleh menerima lagi ekspos bebara vendor. Tapi kenyataannya di atas tanggal 23 Mei, masih ada vendor

yang melakukan ekspos.

“Kalau sudah ada pemenang, kenapa Dinkes masih menerima ekspos. Harusnya, ya sudah stop saja dong. Dan sampai sekarang kabarnya Kadinkes belum mau tanda tangan kontrak. Ini ada apa sebetulnya,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, Reddem kembali mendapat informasi baru, bahwa tanggal 1 Juni sudah ada klik lagi dari PPK untuk pemenang lelang. Pemenangannya adalah PT. Inovasi Medik Indonesia (Imedin). Namun anehnya, ternyata PT. Imedin, tidak termasuk dalam etalase rekam produk lulus pengujian teknis Antropometri Kit yang diterbitkan Kemenkes.

“Setelah kami cek di sistem, memang pemenangnya adalah Imedin. Sementara data di kami yang di rekomendasikan Kemenkes hanya delapan perusahaan, dan Imedin tidak termasuk,” ungkapnya.

Hal inilah menurut Warcono, yang sebetulnya ingin ditanyakan dan diklarifikasi langsung kepada pihak Dinkes Kabupaten Cirebon. Dia beralasan, proyek puluhan milyar tersebut harus dilakukan secara transparan

dan memakai mekanisme, tanpa ada kepentingan pihak manapun.

Seharusnya aku Warcono, pihak dinkes tidak keluar dari koridor delapan perusahaan yang direkomendasikan Kemenkes.

“Wajar kan kami menanyakan masalah ini ke pihak Dinkes. Ini supaya jelas dan mereka memberikan keterangan ke publik. Karena Dinkesnya tutup mulut, ya kami sudah siapkan laporan ke Kejaksaan. Jangan main-mainlah dengan proyek besar, karena ini menyangkut persoalan stunting,” tegasnya.

Sementara itu, beberapa kali dihubungi, Sekdis Dinkes Kabupaten Cirebon, Edi Susanto mengaku tidak tahu menahu proses lelang dan hal teknis lainnya. Semua tanggung jawab akunya, ada di PPK yaitu Sudyono.

Edi juga membantah tuduhan, bahwa sebelumnya ada beberapa vendor yang menghubungi dirinya, dan meminta untuk bisa difasilitasi sebagai pemenang. Malahan Edi juga mengaku tidak pernah ada vendor yang berusaha memberikan fee di depan supaya proyek tersebut bisa lolos. ● **pra**



PRODUKSI TEH UNTUK PASAR EKSPOR

Pekerja meracik teh dan bahan herbal alami saat proses produksi di Sila Tea House, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6). Produksi teh super premium dengan 50 jenis varian teh tersebut sebanyak 500 kilogram hingga 1 ton setiap bulannya dengan pemasaran melalui media sosial dan pasar digital ke sejumlah daerah di Indonesia hingga mancanegara seperti Malaysia, Turki, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat.

ANTISIPASI KERAWANAN PANGAN KARENA EL NINO DKPP KBB Bakal Tambah Cadangan Pangan Hingga 8 Ton

NGAMPRAH (IM) - Guna mengantisipasi kerawanan pangan sebagai dampak dari kemarau panjang disebabkan El Nino, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menambah cadangan pangan daerah yang disimpan di Bulog.

Kepala DKPP Bandung Barat, Lukmanul Hakim mengatakan, cadangan pangan di gudang Bulog yang dimiliki Pemda KBB ada 10 ton.

“Namun, kemarin sudah terpakai di Saguling sebanyak 3,5 ton,” katanya, Rabu (14/6).

Kendati demikian, guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat El Nino pada Agustus 2023, pihaknya bakal menambah cadangan pangan sekitar 8 ton.

“Jadi kalau nanti ada warga kekurangan beras bisa diakses,” ujarnya.

Lukman menjelaskan, jumlah penambahan cadangan pangan daerah tak begitu besar lantaran ketersediaan anggaran terbatas.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Kementerian Pertanian dan Pemprov Jabar ikut andil mengalokasikan dana guna mencegah kerawanan pangan.

Kepala DKPP Bandung Barat, Lukmanul Hakim mengatakan, cadangan pangan di gudang Bulog yang dimiliki Pemda KBB ada 10 ton.

“Kita harap Pemprov

Jabar dan pusat ikut mencari solusi guna menekan angka kerugian terhadap petani dan kerawanan pangan. Apalagi pusat punya dukungan anggaran lebih besar,” jelasnya.

Dengan adanya fenomena kemarau panjang seperti ini, terang Lukman, DKPP ke depan bakal mengembangkan teknologi pertanian berupa pembuatan green house agar petani tetap produksi meski terjadi anomali cuaca.

“Pada 2024 kita berencana akan memakai bantuan teknologi untuk melakukan rekayasa suhu dengan green house dan bantuan teknologi informasi,” terangnya.

Sebelumnya, 1.299 hektar sawah di KBB berpotensi mengalami kekeringan akibat perubahan iklim El Nino.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ribuan hektar sawah tersebut tersebar di 49 desa dari 6 kecamatan meliputi Sindangkerta, Saguling, Cipongkor, Cipatat, Cihampelas, dan Batujajar.

Dari ribuan hektar lahan yang terdasa, Desa Girimukti dan Cipangeran di Kecamatan Saguling menjadi dua desa dengan sebaran potensi kekeringan lahan pertanian paling besar.

Potensi luas kekeringan sawah di Girimukti mencapai 130 hektar. Sedangkan di Cipangeran mencapai 200 hektar. Di luar dua desa itu, potensi luas kekeringan masih di bawah 100 hektar. ● **pra**